

**PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
DAN INTERNAL CONTROL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MAROS)**

Melda Doloksaribu¹, Muhammad Badar², Zulfaidah³, Fitriah Sri Rahayu⁴, Azmiardi Amir Masradin⁵

Universitas Pejuang Republik Indonesia

*Email : meldamariana10@gmail.com, badargallardo@gmail.com, idhabur123@gmail.com,
fitrahsrirahayu@gmail.com*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teknologi informasi dan internal control terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Maros. Responden dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran (PP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) dan Penyelenggara Swakelola yang ada di Pemerintahan Kabupaten Maros. Agar bisa mendapatkan data yang valid, akurat dan relevan maka Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain: metode angket (kuisisioner), studi Pustaka dan mengakses website dan situs-situs. Kuesioner yang debrikan kepada 110 orang sebagai responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisi Regresi Linear berganda.. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Realiabilitas, uji Multikolinearitas serta pengujian asumsi klasik, uji t dan uji F dengan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros, artinya penerapan sistem teknologi informasi harus lebih diperhatikan kedepannya untuk mencapai akuntabilitas pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Penelitian ini membuktikan bahwa *internal control system* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros, artinya semakin baik *internal control system* maka akuntabilitas pengadaan barang dan jasa juga akan semakin baik. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem teknologi informasi dan *internal control system* berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros.

Kata kunci : Akuntabilitas, Sistem Teknologi Informasi, Internal kontrol

Abstrac

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of information technology and internal control on the accountability of procurement of goods/services in Maros Regency. Respondents in this study were Budget Users (PP), Budget User Authorization (KPA), Commitment Making Officers (PPK), Selection Working Groups (POKJA) and Self-Management Organizers in the Maros Regency Government. In order to obtain valid, accurate and relevant data, the techniques used in data collection include: questionnaire methods, literature studies and accessing websites and sites. The questionnaire was given to 110 people as respondents. The data analysis method used is multiple Linear Regression analysis. Hypothesis testing in this study uses the Reliability test, Multicollinearity test and classical assumption testing, t-test and F-test with data analysis methods using multiple linear regression. The results of this study prove that the information technology system does affect the accountability of government procurement of goods and services in Maros Regency, meaning that the implementation of the information technology system must be given more attention in the future to achieve better accountability of procurement of goods and services. This study proves that the internal control system affects the accountability of government procurement of goods and services in Maros Regency, meaning that the better the internal control system, the better the accountability of procurement of goods and services. This study proves that the information technology system and internal control system simultaneously affect the accountability of government procurement of goods and services in Maros Regency. Keywords: Accountability, Information Technology System, Internal Control

Pendahuluan

Keberadaan teknologi tidak bisa dipungkiri sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pemanfaatannya dalam berbagai hal dari yang sederhana sampai mencakup lingkup yang besar jelas sangat membantu, meningkatkan, memudahkan, praktis, dan lainnya dalam konteks positif. Salah satu contoh bentuk pemanfaatan teknologi dalam lingkup yang besar yaitu dalam dunia kerja adalah sebuah informasi. Sistem informasi memanfaatkan teknologi untuk mengolah data menjadi sebuah informasi kemudian dalam penerapannya bersama komunikasi digabungkan dengan jaringan dan komputer membentuk suatu kesatuan serta di gunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Hadirnya sistem informasi memberikan pengaruh yang cukup besar dan penerapannya menjadi sebuah kebutuhan karena memberikan dampak yang baik terhadap kinerja suatu organisasi/perusahaan. Dengan sistem informasi selain pengolahan data menjadi lebih cepat, informasi yang di hasilkan lebih tepat waktu dan akurat, sistem informasi juga membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat (Hayati & Adhi, 2010). Sistem informasi adalah alur proses atau kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bermanfaat dan mendukung fungsi operasional serta dapat membantu manajerial ataupun pihak-pihak di luar lingkup organisasi atau perusahaan atau pemakai informasi misalkan penyajian laporan (Andharsaputri, 2021).

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang/jasa pemerintah permasalahan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan barang dan penyedia jasa. Namun dalam proses pengadaan barang/jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah permasalahan tersebut di sebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang di arahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas di karenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat *administratif* dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan *mark up* anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan Negara.

Pengadaan barang secara konvensional juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Menurut Purwanto berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara pejabat publik dengan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer, kebutuhan akan sebuah sistem yang mampu mempercepat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dengan biaya yang lebih terjangkau, maka instansi pemerintah mulai menggunakan suatu sistem dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam hal pelayanan. Salah satunya adalah dengan penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi *e-procurement* yang di kembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. LPSE sendiri adalah unit kerja yang di bentuk di seluruh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) juga melayani registrasi penyedia barang/jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan (Putir.*et. al* 2018).

Peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, dimana peraturan tersebut telah menggabung, marangkum secara menyeluruh

untuk beberapa peraturan yang telah ada sebelumnya. Menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, pengadaan barang/jasa adalah “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan terima hasil pekerjaan”. Pengadaan barang/jasa melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran untuk pengadaan barang/jasa setiap tahunnya berkisar sekitar 40 % dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang/jasa selalu menjadi sorotan.

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin kompleks sangat mempengaruhi segala bidang kehidupan. Khususnya dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tidak bisa dipisahkan dari peran strategis pengadaan. Tidak akan ada yang namanya pembangunan fasilitas jalan raya, irigasi, perbaikan bangunan sekolah dan ataupun alat kesehatan puskesmas yang diremajakan tanpa pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pengadaan nasional di kuatkan.

Kabupaten Maros adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Marusu yang kemudian berganti bernama menjadi kabupaten Maros sampai saat ini. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa:

1. Kasus Korupsi pengadaan *E-KTP* yang dimana dalam kasus ini diduga Negara mengalami kerugian mencapai Rp 2.3 triliun selain Andi Narogong terdapat juga beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini yaitu diantaranya adalah mantan anggota DPR-RI Miryam S. Haryani, Direktur Utaman Percetakan Negara RI periode 2010-2013, Isnu Edi Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Eletronik Husni Fahmi sebagai tersangka (SIPP).
2. Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Bonto Manurung yang diduga merugikan pemerintah sekitar Rp 1.400.000.000. dan diduga dana desa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi. Yang dimana Suryani ini menjabat sebagai kepala desa Bonto Manurung.
3. Kasus korupsi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) hambalang terjadi pada tahun 2010-2012 yang dimana kasus ini erat hubungan dengan partai demokrat. Berikut pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus tersebut adalah Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Angelina Sondakh Mantan Anggota DPR. Dan diduga pemerintah mengalami kerugian sekitar Rp 1,175 triliun.

Melihat beberapa kasus yang terjadi, maka perlu untuk memperbaiki proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum sesuai dengan harapan. Perbaikan/reformasi pengadaan terus di upayakan oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya kesalahan maupun praktek kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 = Terdapat pengaruh Sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah kabupaten Maros.

H2 = Terdapat pengaruh *Internal control system* terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah Maros.

H3 = Terdapat pengaruh sistem teknologi informasi dan *internal control system* terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah pada kabupaten Maros.

Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, kegunaan dan tujuan. Menurut Darmadi (2015), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut Strauss dan Corbin (2007), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden aparat lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Maros untuk mengetahui signifikansi hubungannya dengan akuntabilitas pemerintah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif yang bisa didapatkan dengan dua cara yaitu melalui wawancara dan pengambilan data dari kantor lembaga pengadaan barang dan jasa. Jenis data kualitatif adalah data yang berupa non-numerik dan tidak dapat di proses dalam bentuk angka, dan data ini pada umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan informasi.

Hasil Penelitian

Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana penilaian satu responden dapat diprediksi dengan responden yang berbeda atau pada akhirnya sejauh mana suatu pernyataan harus terlihat sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam menentukan klarifikasi. Untuk melihat kualitas yang tak tergoyahkan dari setiap instrumen yang digunakan, pencipta menggunakan koefisien alpha (α) Cronbach. Pengujian kualitas yang tak tergoyahkan dengan konsistensi batin dilakukan dengan mencoba instrumen hanya satu kali, kemudian data diperiksa.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Krisis	Keterangan
Sistem Teknologi informasi	0,703	0,6	Reliabel
Internal control sistem	0,819	0,6	Reliabel
Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	0,916	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil dari uji dependabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua faktor memiliki *alfa Cronbach* yang sangat besar, yaitu di atas 0,6 jadi bisa dikatakan bahwa semua pemikiran penilaian untuk setiap variabel dari survei kuat sehingga untuk hal berikutnya pada semua pemikiran variabel ini pada dasarnya digunakan sebagai alat penilai faktor pemeriksaan.

Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsi antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		standardize d	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.743	3.666		.201	.840

	Sistem Teknologi Informasi	.157	.132	.107	1.188	.238
	Internal control system	.813	.144	.647	7.158	.000

Berdasarkan hasil perhitungan regresi ganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan yaitu $Y = 0,743 + 0,157X_1 + 0,814X_2$. Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas maka diambil suatu analisis bahwa: Konstanta sebesar 0,743 artinya jika tidak ada variabel sistem teknologi informasi dan *internal control system* maka akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Maros adalah sebesar 0.743 satuan. Koefisien regresi untuk variabel sistem teknologi informasi adalah sebesar 0,157 dan bertanda positif artinya jika variabel sistem teknologi informasi ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Maros adalah 15,70%. Koefisien regresi untuk variabel *internal control system* adalah sebesar 0,813 dan bertanda positif artinya jika variabel *internal control system* ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sebesar 18,70%.

Pengujian Parsial (Uji T)

Pengujian Parsial atau Uji Ketepatan Parameter Penduga (*Estimate*). Digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individu dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		standardize d	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.743	3.666		.201	.840
	Sistem Teknologi Informasi	.157	.132	.107	1.188	.238
	Internal control system	.813	.144	.647	7.158	.000

Dari pengujian hipotesis secara parsial sistem teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros diperoleh nilai sig = 0,238 > 0,05 dan nilai rhitung 1,188 < 1,982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu "Sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah kabupaten Maros" tidak dapat diterima kebenarannya. Dari pengujian hipotesis secara parsial *internal control system* terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05 dan nilai rhitung 7,158 > 1,982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu "*Internal control system* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah Maros" dapat diterima kebenarannya.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk melakukan pengujian hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan berikut:

1. *Quick look*: ketika nilai $F > 4$ maka H_0 di tolak pada derajat kepercayaan 5%. Sehingga H_a diterima dengan pernyataan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Melakukan perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Ketika F hitung > F tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.11
Hasil Analisis Koefisien F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	924.735	2	462.368	58.933	.000 ^b
	Residual	839.483	107	7.864		
	Total	1764.218	109			

Berdasarkan hasil pengujian pada uji F diatas dapat dilihat pada tabel diatas diketahui nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai F hitung $58,93 > 3,08$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel sistem teknologi informasi dan *internal control system* terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros.

Koefisien Determinasi

Untuk menguji model ujian ini adalah dengan menghitung koefisien jaminan (R^2) pada dasarnya memperkirakan seberapa jauh kemampuan model untuk memahami keragaman lingkungan. Nilai koefisien penjaminan berada pada kisaran nol dan satu (Ghozali, 2011).

Tabel 4.12
Hasil Analisa Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimete
1	.724 ^a	.524	.515	2.80101

Besarnya pengaruh dari sistem teknologi informasi dan *internal control system* secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros adalah sebesar 51,5% dan selebihnya yaitu sebesar 48,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

1. Sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah kabupaten Maros.

Dari pengujian hipotesis secara parsial sistem teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros di peroleh nilai $sig = 0,238 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu "Sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah kabupaten Maros" tidak dapat diterima kebenarannya. Terkadang dalam menjalankan aplikasi SPSE yang digunakan sering mengalami kendala yang menyebabkan sistem tidak berfungsi secara efektif. Proses dapat terhambat apabila laman mengalami gangguan teknis, dan penyebab lainnya biasanya karena kualitas jaringan internet pada masing-masing penyedia barang dan jasa yang kurang bagus. Begitu pula halnya yang terjadi pada peserta yang akan mengikuti lelang, jika jaringan atau sistem yang sedang bermasalah maka mereka akan terhambat dan bahkan bisa gagal login ke sistem. Mengingat pada proses penawaran barang dan jasa ada limit waktu yang sehingga jika lewat dari waktu yang ditentukan tersebut mereka gagal memasukkan penawaran pada sistem.

Kerangka kerja inovasi data dilibatkan oleh asosiasi untuk menangani dan menyimpan data, serta bekerja sebagai penyebaran data. Dampak kerangka inovasi data dapat memudahkan dan membantu tugas yang dilakukan, seperti perencanaan laporan keuangan. Rahadi (2017) menyatakan bahwa kerangka kerja inovasi data memiliki kelebihan atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat investasi. Demikian pula pada level otoritas publik, pemanfaatan inovasi dimanfaatkan oleh otoritas pemerintah dalam mengawasi informasi dan kesalahan data.

Inovasi data ini juga dapat digunakan sebagai media untuk membatasi kesalahan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Mengingat hipotesis Penatagunaan, kepala, khususnya otoritas publik memiliki pilihan untuk mempertimbangkan bertanggung jawab atas pengelolaan dana pemerintah. Dengan demikian, otoritas publik di Rezim Maros memiliki komitmen untuk membuat laporan sesuai pedoman dan tidak mengandung komponen yang membingungkan klien laporan perolehan tenaga kerja dan produk. Pemanfaatan kerangka inovasi data membuat laporan keuangan lebih solid dan relevan. Kerangka inovasi data akan bekerja dengan rekonsiliasi laporan dari pemerintah daerah Maros ke pemerintah pusat. Selanjutnya kerangka inovasi data akan membatasi penanguhan dalam mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab akuisisi tenaga kerja dan produk pemerintah dalam Peraturan Maros.

2. *Internal control system* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah Maros.

Dari pengujian spekulasi sampai taraf tertentu, kerangka kendali ke dalam atas tanggung jawab perolehan tenaga kerja dan produk pemerintah di Rezim Maros mendapat nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$ sehingga cenderung diduga bahwa teori selanjutnya adalah “Kerangka kendali dalam mempengaruhi tanggung jawab perolehan barang dagangan/administrasi di pemerintahan Maros “kebenaran yang memuaskan”.

. Sementara itu, menurut Mahela dan Iulian (2015) menyatakan bahwa administrasi perusahaan dan kerangka pengendalian internal tidak boleh dilihat secara independen. Sebuah organisasi tanpa sudut pandang otoritas jangka panjang yang mahir, sistem kerangka kendali internal yang kuat tidak dapat bertahan. Sejalan dengan itu, administrasi perusahaan tidak akan berjalan dengan sukses tanpa kontrol orang dalam yang baik.

Dengan adanya fungsi pengendalian internal (*internal control system*) yang baik maka akan mengurangi resiko tindak kecurangan (*fraud*) di dalam lingkup pengadaan barang dan jasa. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Undang-undang tidak resmi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Kerangka Pengendalian Inner Otoritas Publik (SPIP) mencirikan kerangka Kontrol Inner Otoritas Publik sebagai rangkaian kegiatan dan latihan fundamental yang dilakukan tanpa henti oleh para pelopor dan semua pekerja untuk memberikan kepercayaan yang memuaskan dalam pencapaian tujuan otoritas. Badan Penyelenggaraan Moneter dan Peningkatan (BPKP) menyatakan bahwa Alat Administrasi Perkantoran Otoritas Publik sebagai salah satu cara untuk mendorong pelaksanaan Pengendalian Dalam Negeri Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP berperan penting dalam pengawasan tanggung jawab administrasi moneter pemerintah.

3. Sistem teknologi informasi dan *internal control system* berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah pada kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil pengujian pada uji F yang telah diketahui nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai F hitung $58,93 > 3,08$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel sistem teknologi informasi dan *internal control system* terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros.

Dari hasil uji yang telah dilakukan diperoleh hasil yang dimana jika dilakukan uji terhadap setiap variabel secara masing-masing ditemukan bahwa pada hipotesis pertama yaitu sistem teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros. Tetapi jika diuji secara simultan kedua variabel tersebut maka diperoleh hasil yaitu kedua variabel berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Maros. Dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan *internal control system* yang baik maka upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros akan terwujud.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu penelitian ini membuktikan bahwa sistem teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros, artinya penerapan sistem teknologi informasi harus lebih diperhatikan kedepannya untuk mencapai akuntabilitas pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Penelitian ini membuktikan bahwa *internal control system* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros, artinya semakin baik *internal control system* maka akuntabilitas pengadaan barang dan jasa juga akan semakin baik. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem teknologi informasi dan *internal control system* berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Maros.

Bibliography

- Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, 2013. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Abdul Karim, et. al. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Cetakan Pertama Yayasan Labuhanbatu Berbagu Gemilang.
- Agung Suprianto, et al. 2019. *Analisis Efektivitas Sistem E-procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Adaministrasi Public Vol.5 No. 2.
- Badzalina Daroyani Novitanigrum. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 2 No. 1.
- Davis , F.D., Bagozzi, R.P and Warshaw, P.R. 1989. "Use Acceptance of Computer Technology: A Comparison ff Two Theoretical Models," *Management Scince* (35:5), pp. 982-1002.
- Dr. Farida Nugrahani. 2014. *Metode penelitian dalam bidang Pendidikan Bahasa*.
- Drs.H. Kasiyanto Kasemin. 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Perkembangan Penelitian Tentang Perembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuad Adi Nugroho, et al. 2021. *Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengendalain Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Pada Auto 2000 Kenjeran Surabaya*. Jurnal Sains Sosio Huaniora. Vol.5. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN 2580-2305.
- Haag dan Keen. 1996. *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College.
- Kaelan. 2012. *Metode penelitian kuantitatif*.
- Moh. Reza Maulana. 2021. *Pengendalain Internal Melalui Risk Assement pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli*. Jurnal Riset Akutansi dan Auditing "Goodwill" Vol 12.
- Muhammad Fadil. 2020. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Mulyadi. (2009). *Auditing*. Yogyakarta: STIE YPKPN.
- Qori Luis Pratiwi. et al. 2013. *Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-procurement*. Jurnal Administrasi Public. Vol. 2 No. 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Pratiwi Putri, et al. 2018. *Penerapan Siap dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik untuk Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vo; 8 No. 3 ISSN 2599-265.

- Purnomo Edy Mulyono. 2016. *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*. Airlangga Development Journal. Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Vol 12 (63-74).
- Resti Lia Andharsaoutri. 2021. *Rancangan Bangun Sistem Informasi Pengadaan dan Jasa Berbasis Desktop*. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi. Vol. 12, No. 1 (2580-8397).
- Sabihaini, 2006. *Analisis Pemnafaatan Teknologi Informasi dan Kinerja Individual (Studi Pada Rumah Sakit di Yogyakarta)*. Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi, Vol.0 No. 1.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tangerang*. <http://sipp.pn-tangerang.go.id>. Diakses pada tanggal 19 juli 2022.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Maros*. <http://sipp.pn-maros.go.id>. Diakses pada tanggal 19 juli 2022
- Siti Afifah, et al. 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Lompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Informasi, Dan Peran Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness Vol. 2
- Sri Maharani. 2003. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akutasi Manajemen*. Jurnal Ekonomi Akutansi. Vol. 2: 127-137.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman. 2012. *Buku Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tata Sutabri, 2014. *Analisis Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Willams dan Sawyer. 2003. *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Commucations*. London: Careeeducation
- Zulfaidah, et.al. 2020. *Utilization Of Information Technology and Internal Control System on Accountability of Procurement of Goods and Government Services*. Jurnal Business and Entrepreneurial Review. Vol.2, No.1